

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kota Semarang

Halaman 17 dan 20

Tarif PDAM Diminta Sesuai Permendagri



Hal itu seiring dengan akan dibangunnya tiga sistem penyediaan air minum (SPAM). Sebab, saat dikerjasamakan dengan pihak ketiga, bisa memengaruhi tarif pelanggan. Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen

(LP2K) Kota Semarang, Ngargono menuturkan, sesuai dengan Peraturan Mendagri No 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

Tarif...

(Sambungan hlm 17)

Dalam aturan itu tarif PDAM per meter kubik, tidak boleh lebih dari empat persen dari upah minimum kabupaten/kota (UMK) masing-masing daerah.

"Meski dikerjasamakan dengan pihak ketiga, jangan sampai Pemkot dan PDAM tidak berdaya dalam penetapan tarif tersebut. Pasalnya, masyarakat yang akan mendapatkan beban tersebut. Kalau bisa disamakan dengan tarif sekarang yang sudah tidak naik sejak 2010 lalu," imbuh Ngargono, kemarin.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PDAM Tirta Moedal akan membangun tiga SPAM, yakni Semarang Barat, Jatisari, dan Pudukpayung. Karena kebutuhan anggarannya pembangunan sangat besar, disiapkan pilihan mengajak kerja sama pihak ketiga.

Untuk pembangunan SPAM Semarang Barat butuh anggaran Rp 1,072 triliun. Sementara SPAM Jatisari, Kecamatan Mijen, butuh anggaran Rp 151 miliar. Adapun SPAM Pudukpayung, Kecamatan Banyumanik, butuh dana Rp 128 miliar. Dengan demikian, totalnya sekitar Rp 1,351 triliun.

"Pembahasan tarif sebaiknya saat pembangunan selesai. Kemudian juga dihitung biaya operasional, membayar gaji karyawan, dll. Baru kemudian, besaran itu dibebankan kepada masyarakat. Jangan dibahas dulu sekarang, karena bangunan belum jadi," tambah Ngargono.

IPA Kudu

Kasus pembangunan IPA Kudu

juga menjadi pembelajaran yang baik. Saat dibangun pada 2001 lalu, imbuhnya, membutuhkan anggaran sekitar Rp 490 miliar. Dana itu didapat PDAM Tirta Moedal dengan meminjam ke pemerintah pusat. Namun, hingga 2016 atau selama 15 tahun, utang tidak lunas.

Utang itu kemudian lunas, setelah pemerintah pusat memberikan bantuan ke Pemkot. Skema dilakukan berdasarkan surat Kemenkeu Nomor S618/PB/2016 tentang penerimaan hibah non-khas pemerintah kepada daerah untuk menutupi utang PDAM.

"Kasus Kudu menjadi gambaran bersama agar tidak terulang lagi. Sekarang harus benar-benar diperhitungkan dengan seksama, karena kali ini melibatkan pihak ketiga, yang bukan unsur pemerintahan," ujarnya. Sementara itu, Pjs Dirut PDAM Tirta Moedal, M Farchan menuturkan, untuk skema pembangunan SPAM Semarang Barat sudah diputuskan. Selain ada bantuan dari pemerintah pusat, juga ditambah dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Adapun untuk SPAM Jatisari dan SPAM Pudukpayung masih dalam tahap pembahasan. Namun demikian, pembangun tetap dilakukan. Saat ini, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana, sudah menyiapkan anggaran untuk pembangunan bendung dan Intake.

"Saya rasa, peminat untuk proyek ini sangat banyak. Pasalnya, potensi pelanggannya besar. Hal itu melihat pertumbuhan permukiman di Kecamatan Mijen, dan Ngaliyan. Begitu juga di Semarang bagian selatan, seperti Tembalang dan Meteseh," tambah Farchan.(K18-22)